

ADVOKASI BERJEJARING DAN SOCIAL MOVEMENT PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL PONOROGO DI HONG KONG MELALUI PEMBENTUKAN KOMUNITAS KEDAERAHAN

Deby Febriyan Eprilianto¹, Suci Megawati², Galih Wahyu Pradana³, Vita Mahadhika⁴,
Dita Perwitasari⁵, Dwi Anggorowati R⁶, Heni Purwa Pamungkas⁷, Bellina Yunitasari⁸,
Muhammad Arif Mahdiannur⁹, Ali Hasbi Ramadani¹⁰, Heru Arizal¹¹, Lisa Amelia Sari¹²,
Mohammad Hermy H¹³, Ryke Angelly¹⁴, Azzahroh Rachmadhani¹⁵

^{1,2,3,12,13,14,15} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Surabaya

^{4,5} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

⁶ Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya

⁷ Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

⁸ Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya

⁹ Program Studi Pendidikan Sains, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Surabaya

^{10,11} Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya

e-mail : debyepriyanto@unesa.ac.id

Abstrak

Peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia, salah satunya di Hong Kong menjadikan peluang dan tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan keselamatan dan keamanannya. Banyaknya kasus terkait dengan kesejahteraan dan kesenjangan pekerja migran seringkali dialami, baik secara fisik maupun secara mental. Butuhnya dukungan orang terdekat dalam penanganan berbagai permasalahan yang terjadi sangatlah diperlukan. Jumlah PMI asal Ponorogo di Kabupaten Ponorogo merupakan jumlah yang tertinggi di Hong Kong. Berdasarkan analisa awal yang dihadapi oleh mitra, antara lain: (1) belum terwadahi secara kelembagaan keberadaan Pekerja Migran Indonesia asal Ponorogo di Hongkong, (2) minimnya pemanfaatan jejaring kedaerahan yang dilakukan untuk berkegiatan bersama, (3) belum dimanfaatkan secara baik momentum bersama yang dilakukan setiap bulan sekali bahkan setiap minggu sekali yang dilakukan, (4) jika terjadi permasalahan pada Pekerja Migran Indonesia kecenderungan diselesaikan dan dipendam secara individu, belum adanya wadah untuk konsultasi, dan (5) rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi, namun belum adanya kegiatan positif yang dilakukan secara bersama. Adapun solusi yang dapat ditawarkan, antara lain: (1) pendampingan dalam pembentukan Komunitas Kedaerahan PMI asal Ponorogo di Hongkong, (2) program kegiatan pelatihan dan seminar advokasi dan kepemimpinan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, dan (3) kegiatan social movement sebagai wadah berbagi dan peduli terhadap sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan berkolaborasi dengan KJRI Hong Kong dan Dompot Dhiafa Hong Kong.

Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia, Advokasi, Komunitas Kedaerahan

Abstract

The increase in the number of Indonesian migrant workers, one of whom is in Hong Kong, creates opportunities and challenges for the implementation of safety and security. There are many cases related to the welfare and inequality migrant workers often experience, both physically and mentally. The need for support from those closest to you in handling various problems that occur is very necessary. The number of PMI from Ponorogo in Ponorogo Regency is the highest number in Hong Kong. Based on the initial analysis faced by partners, among others: (1) the presence of Indonesian Migrant Workers from Ponorogo in Hong Kong has not been institutionally accommodated, (2) minimal use of regional networks for joint activities, (3) the collective momentum has not been utilized properly. carried out once a month or even once a week, (4) if problems arise among Indonesian Migrant Workers, they tend to be resolved and dealt with individually, there is no forum for consultation, and (5) there is a high sense of togetherness and kinship, but there are no positive activities which is done together. The solutions that can be offered include: (1) assistance in the formation of the PMI Regional Community from Ponorogo in Hong Kong, (2) training activity programs and advocacy and leadership seminars to increase the sense of kinship and togetherness, and

(3) social movement activities as a forum share and care about the socio-economic community. Activities that have been carried out in collaboration with the Indonesian Consulate General in Hong Kong and Dompot Dhiafa Hong Kong.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Advocacy, Regional Communities

PENDAHULUAN

Migrasi telah menjadi salah satu fenomena yang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat dimana fenomena tersebut ditandai dengan adanya perpindahan penduduk dari satu tempat ketempat lain. Fenomena migrasi merupakan salah satu komponen dalam perubahan jumlah penduduk dunia terutama Indonesia, selain kelahiran dan kematian (Lubis, 2012). Migrasi atau perpindahan penduduk merupakan salah satu masalah kependudukan sebagai akibat dari proses hubungan timbal balik antar penduduk degan lingkungannya. Jika penduduk bertambah banyak, sedangkan lingkungan atau tempat tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk, maka jalannya keluarnya adalah dengan bermigrasi, dengan migrasi penduduk beranggapan bahwa kondisi yang lebih baik di badingkan dengan daerah asal (Sarira, 2018).

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang saat ini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah istilah untuk tenaga kerja dalam negeri yang bekerja diluar negeri. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang saat ini disebut PMI (pekerja migran indonesia) adalah istilah untuk tenaga kerja dalam negeri yang bekerja diluar negeri (Jumaah, 2023). Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran mengartikan bahwa Pekerja Migran Indsonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah republik Indonesia (Alunaza, et.al., 2023). Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan total penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 274.964 orang per Januari 2024 dengan didominasi oleh perempuan sebanyak 146.785 orang. PMI adalah sebutan terbaru menggantikan istilah Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita yang berasal dari Indonesia. Latar belakang Pendidikan PMI didominasi oleh lulusan SMA yakni sebanyak 8.394 orang. Mereka terserap banyak sebagai tenaga kerja sector non formal yakni bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga sebanyak 66.362 orang. Jumlah tersebut setara dengan 24,13% dari total PMI pada periode Januari 2023 – januari 2024. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan lulusan SMA lebih memilih menjadi Pembantu Rumah Tangga di Luar Negeri daripada di dalam Negeri.

Faktor yang menyebabkan seseorang memilih menjadi migran internasional dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni factor pendorong dan factor penarik (Afrindo, 2014, dan Madaniyah, et.al., 2024). Faktor pendorong yang dimaksud diantaranya adalah karena menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal, pendapatan yang rendah, Perkawinan, Pendidikan rendah dan beban tanggungan keluarga. Sedangkan factor penariknya adalah tingkat upah yang tinggi, ketersediaan lapangan pekerjaan yang banyak untuk latar belakang Pendidikan dan kualifikasi keahlian mereka. Menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun dalam hal ini negara juga diuntungkan oleh keberadaan para pekerja Indonesia di luar negeri yang telah menjadi penyumbang devisa nomor dua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas) (Oroh, 2023). Penempatan PMI tersebar di beberapa negara yang bekerja sama dengan Indonesia khususnya paling banyak ada di Kawasan Asia dan Afrika.

Dari data menunjukkan bahwa BP2MI membagi menjadi 3 kawasan penyebaran PMI. Namun kawasan yang paling diminati oleh PMI adalah Kawasan Asia dan Afrika dengan jumlah 255.843. Jumlah tersebut sangat mendominasi atau setara dengan 93,04% dari total keseluruhan jumlah PMI per Januari 2024. Penyebaran PMI di Kawasan Asia dan Afrika diantaranya adalah Taiwan, Malaysia, Hongkong, Jepang dan Korea Selatan. Berikut adalah gambar tabel penempatan PMI tertinggi di beberapa negara tujuan:

Tabel 1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan Negara

Negara	2016	2027	2018	2019	2020	2021	2022
Malaysia	1862	1876	1902	1883	1633	1628	1670
Arab Saudi	969	963	961	961	833	833	837
Hong Kong	132	178	208	250	231	281	339

Taiwan	177	208	264	328	283	290	331
Singapura	106	98	99	103	88	91	95

Sumber: Data BP2MI, 2024

Dari data BP2MI diatas menunjukkan bahwa Malaysia menjadi negara tujuan utama yang banyak diminati oleh PMI yakni sebesar 1670 orang sedangkan Hongkong menempati urutan ketiga yakni sebesar 339 orang. Angka tersebut sangat mendominasi dari angka total PMI. Pemilihan negara tujuan dikarenakan banyak factor diantaranya yang paling sering dijumpai adalah karena alasan standar gaji yang lebih tinggi dari negara lain, jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja asing Wanita oleh negara, diberikan hari libur sabtu dan minggu (Hamid, 2023).

Dalam beberapa decade terakhir banyak permasalahan yang dihadapi oleh para PMI di Luar Negeri. Permasalahan tersebut antara lain adalah kurangnya perlindungan hukum, tidak memiliki dokumen resmi, kurangnya pengawasan oleh BP2MI maupun kedutaan Besar RI (KBRI) setelah berada di Luar negeri, dan sulitnya akses untuk berkomunikasi dengan KBRI (Ningtyas, dan Fauziyah, 2024). Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, pemerintah juga secara responsive menanggapi permasalahan tersebut dengan menerima pengaduan PMI melalui BP2MI baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan PMI sampai dengan desember 2023 tercatat sebanyak 1.999 aduan dimana jumlah tersebut jika diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin pengadu yakni 806 laki-laki dan 1.193 perempuan. Namun pengaduan tersebut adalah pengaduan total yang diterima oleh BP2MI sampai dengan bulan desember 2023. Jika dilihat dalam satu tahun belakangan ini, jumlah pengaduan yang diterima oleh BP2MI berjumlah 71 pengaduan yakni 11 aduan melalui surat, 23 aduan secara langsung dan 37 aduan melalui telepon.

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 5 kategori pengaduan yang diterima oleh BP2MI selama satu tahun terakhir yakni: pekerja migran ingin dipulangkan, gaji tidak di bayarkan, meninggal dunia, gagal berangkat dan overstay. Aduan pekerja migran ingin dipulangkan mendominasi aduan dengan berbagai alasan seperti menerima perlakuan kekerasan baik fisik maupun seksual dari majikan maupun dari luar tempat bekerja (Denimah dan Nurika, 2023). Permasalah migran ini tentu saja harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan komunikasi dan pengawasan serta perlindungan kepada mereka. Era digitaslisasi saat ini memungkinkan untuk menghimpun para PMI berdasarkan asal daerah dan sebaran penempatannya di Negara terkait. Dengan demikian dapat membantu meminimalisir permasalahan komunikasi antara pekerja migran dengan perwakilan pemerintah sehingga diharapkan lebih responsive terhadap permasalahan PMI (Yuspin, et.al., 2024, dan Martiany, 2016).

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang angka PMI tertinggi yakni sebesar 68.062 orang sesuai data BP2MI per Januari 2024. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dan Jawa barat. Salah satu kabupaten yang berkontribusi menyumbangkan PMI tertinggi provinsi Jawa Timur adalah kabupaten Ponorogo sejumlah 9.181 orang. Angka tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat Ponorogo sebagian besar memilih bekerja menjadi PMI dan memilih negara Taiwan dan Hongkong sebagai negara tujuan (Auliya, 2022, dan Fikriansyah, 2023). Hal tersebut disebabkan karena factor pendapatan dan jenis pekerjaannya sesuai dengan keahlian PMI (Septika, dan Muallifin, 2024, dan Pratama, 2020).

PMI asal Ponorogo kebanyakan memilih Hongkong sebagai negara tujuan migran sebab banyak teman atau kerabat yang sudah lama menjadi PMI yang ditempatkan disana. Hal tersebut menjadi faktor penarik tersendiri bagi mereka karena merasa aman dan nyaman ada orang yang berasal dari daerah yang sama. Tidak dapat dipungkiri PMI tidak lepas dari permasalahan homesick, yakni keadaan yang dialami seseorang yang jauh dari lingkungan rumah, meninggalkan kebiasaan dan lingkungan lama, dengan perasaan asing terhadap diri sendiri ketika berada di lingkungan baru. homesick bukanlah gangguan emosi. Namun, hal ini bisa berdampak pada kesehatan mental ketika tidak ditangani segera. Josh Klapow, profesor dan psikolog klinis di University of Alabama's School of Public Health, mengatakan homesick datang dari kebutuhan naluriah atas perasaan kasih sayang, perlindungan, dan rasa aman yang belum terpenuhi ketika seseorang berada di lingkungan baru. Penyebab homesick adalah perbedaan gaya hidup atau kebiasaan di lingkungan baru, adaptasi dengan

budaya baru, kesulitan berkomunikasi atau menjalin hubungan interpersonal, dan merasa dikucilkan atau dibedakan oleh lingkungan baru. Salah satu cara mengatasi homesick adalah dengan berkenalan dengan orang-orang baru yang mengalami keadaan serupa, senasib dan sepenanggungan sehingga saling menguatkan dan melakukan aktivitas-aktivitas menyenangkan (Widodo dan Belgradoputra, 2019, dan Hidayat, et.al., 2021).

Hal ini sejalan dengan yang di lakukan PMI Hongkong asal Ponorogo, Jejaring yang telah dimiliki sering dimanfaatkan untuk melakukan gathering hanya sekedar bertemu saja. Bahkan pertemuan tersebut dilakukan secara rutin mingguan ataupun bulanan pada saat libur kerja. Seringkali pertemuan tersebut dilakukan untuk makan bersama seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kegiatan Makan Bersama
Sumber: Dokumentasi PMI Ponorogo Hongkong, 2024

Dari gambar diatas terlihat bahwa para PMI meluangkan waktu setiap hari libur kerja untuk sekedar bertemu, sharing dan makan bersama. Hal ini sejalan dengan teori propinquity yang dikembangkan oleh Fred Luthans (1939) (dalam Qawiyurrijal, 2021). Teori ini menjelaskan tentang adanya afiliasi (perkenalan) diantara orang-orang tertentu. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena kedekatan ruang dan daerahnya. Dari gambar diatas dapat terlihat jelas bahwa kedekatan mereka terjalin sangat akrab karena berasal dari daerah yang sama dan sedang berada pada ruang yang sama yakni sam-sama bekerja sebagai PMI di Hongkong. Selain makan bersama, mereka juga seringkali mengisi waktu libur dengan mengikuti kajian majelis Bersama Dompot Dhuafa seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2. PMI Hong Kong Mengikuti Kajian Majelis Bersama Dompot Dhuafa
Sumber: Dokumentasi PMI ponorogo Hongkong, 2024

Dari gambar tersebut terlihat bahwa para PMI memiliki motivasi tinggi untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, melalui kegiatan tersebut para PMI bisa saling mengenal satu sama lain dan saling menjadi support system (Solechan, et.al., 2020). Kondisi saat ini para PMI Ponorogo yang berada di Hongkong membentuk kelompok-kelompok sosial kecil yang tidak terorganisir. Kelompok-kelompok kecil ini terdiri dari beberapa anggota PMI ponorogo yang terbentuk karena minat atau kesukaan yang sama sehingga tidak mengakomodir semua PMI

Ponorogo yang berada di Hongkong. Hal tersebut dapat terlihat dari WA grup yang dimiliki oleh PMI Ponorogo Hongkong berikut.



Gambar 3. Salah Satu Kelompok Kecil PMI Ponorogo dengan Minat Majelis Taklim Sumber: Dokumentasi PMI Ponorogo Hongkong, 2024

Dari gambar diatas terlihat bahwa yang tergabung dalam WA grup tersebut hanyalah PMI Ponorogo yang memiliki minat sama dalam hal kajian majelis dan hanya beranggotakan 29 orang di distrik wongtaisins. Kelompok lain yang terbentuk adalah kelompok penempatan berdasarkan daerah migran dengan penamaan masing-masing. Padahal adanya jejaring sosial kedaerahan dianggap penting dan perlu dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi para PMI dan dapat menjembatani komunikasi dengan perwakilan pemerintah jika terjadi suatu masalah (Utami, 2023). Berlatar belakang identifikasi kondisi dan masalah tersebut, maka tim menganggap perlu untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PMI di Hong Kong untuk membantu dalam membentuk komunitas kedaerahan melalui advokasi berjenjang dan social movement sehingga mampu berdampak meluas dan berkelanjutan.

METODE

Metode yang dilaksanakan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini yaitu melalui : a) Focus Group Discussion (FGD), b) sosialisai, dan c) pendampingan. Aktivitas FGD dilakukan secara daring dan luring baik dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI Hong Kong dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). FGD secara daring dilakukan untuk melakukan identifikasi permasalahan dan penentuan tema, serta materi yang akan disampaikan pada kegiatan PKM ini, sedangkan untuk FGD secara luring dilaksanakan dengan dan bertempat di KJRI Hong Kong pada tanggal 12-13 Juli 2024, sedangkan FGD luring dengan PMI dilakukan bertempat di Dompot Dhuafa Hong Kong pada tanggal 14-15 Juli 2024. Kegiatan FGD secara luring dilakukan untuk penjajagan kerjasama antara Unesa dengan KJRI Hong Kong dan identifikasi kebutuhan advokasi serta kesiapan dalam proses pembentukan komunitas kedaerahan. Kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi yang dilakukan pada PMI terkait dengan advokasi berjenjang oleh narasumber dari Tim PKM yang berasal dari program studi S1 Ilmu Hukum. Terakhir kegiatan yang dilakukan yaitu pendampingan dalam pembentukan komunitas kedaerahan PMI asal Ponorogo di Hong Kong. Selain itu juga dilakukan pendampingan dalam pengelolaan media social komunitas kedaerahan yang telah terbentuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

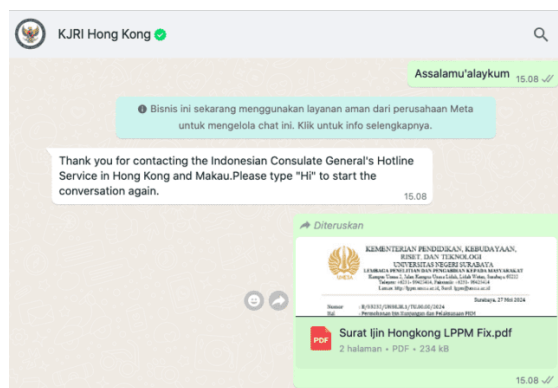
Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dianalisis dan diuraikan secara detail dari tahapan yang telah dilakukan. Tahapan yang telah dilakukan merupakan serangkaian kegiatan yang berkelanjutan yang saling terikat satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Hasil analisis masing-masing tahapan dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

Tahap perencanaan

Pada tahap ini tim PKM melakukan perencanaan kegiatan dengan melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan kegiatan dengan para PMI Ponorogo Hongkong melalui daring. Pada tahap ini, tim PKM internasional yang terdiri dari dosen dengan latar belakang keahlian berbeda-beda dibantu dengan mahasiswa melakukan komunikasi awal secara daring dengan perwakilan PMI Ponorogo

hongkong. Komunikasi dilakukan sebanyak 2 kali sebelum tanggal keberangkatan yang sudah ditentukan. Dalam komunikasi yang terjalin dilakukan kajian mendalam terkait dengan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh PMI ponorogo di hongkong selama ini dan bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut. Hasil identifikasi awal menyatakan bahwa belum adanya komunitas kedaerahan yang dapat menaungi permasalahan mereka dan menjembatani dengan pihak Konsulat Jendral RI sebagai representatif pemerintah yang berada disana. Jejaring yang ada hanyalah sebatas jejaring kajian agama dan jejaring lingkup pertemanan dari agensi yang sama periode keberangkatannya sehingga mereka masih merasa sendiri dan tidak aman di negeri orang. Koordinasi awal dengan KJRI untuk menggali data dan informasi terkait dengan permasalahan dan kebutuhan PMI. Dari data dan informais yang didapat menunjukkan bahwa jumlah PMI di Hong Kong merupakan termasuk terbanyak dibandingkan dnegan negara yang lainnya. Termasuk juga jumlah PMI asal Ponorogo Jawa Timur di Hong Kong merupakan jumlah PMI terbanyak dari Indonesia. Hal ini yang menjadikan dasar kegiatan ini menfokuskan pada pembentukan komunitas kedaerahan PMI asal Ponorogo. Dari informasi awal juga mendapati bahwa belum ada/belum terbentuknya komunitas kedaerahan yang khusus, hanya saja telah terbentuk komunitas yang levelnya nasional yaitu Indonesia. Mengingat bahwa jumlah PMI yang banyak di Hong Kong, komunitas ini belum bisa mengakomodir dan merangkul semua PMI. Anggota yang aktif dalam komunitas ini kurang lebih sekitar 25-30% dari jumlah PMI yang ada.

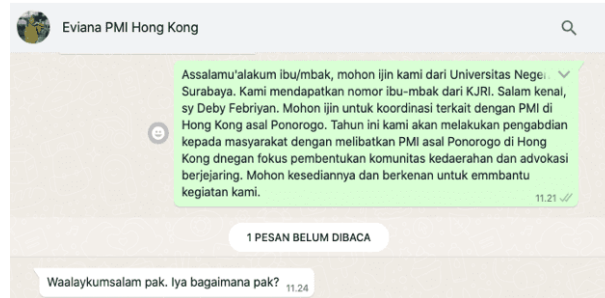
Selain data dan informasi tersebut, dari koordinasi awal yang telah dilakukan tim mendapat bahwa banyaknya kasus yang terjadi pada PMI di Hong Kong, terutama pada saat awal-awal kedatangannya. Kasus yang paling banyak terjadi karena kurang lancarnya bahasa, PMI ingin dipulangkan, PMI bekerja sering menggunakan HP, kekerasan terhadap PMI, PMI tidak diberikan gaji, PMI tidak diberikan waktu libur, dsb. Permasalahan tersebut telah menjadi fokus KJRI sebagai representatif dari Pemerintah Indonesia di Hong Kong untuk senantiasa hadir memberikan dukungan dan bantuan. Namun kendala yang dihadapi adalah PMI banyak yang enggan untuk mendatangi KJRI bahkan untuk menghubungi KJRI secara langsung. Oleh karena itu kehadiran komunitas kedaerahan ini dirasa sangat penting. Koordinasi dengan KJRI dilakukan melalui saluran telepon, WA, email dan ditindaklanjuti melalui kegiatan pertemuan daring. Berikut adalah bukti pelaksanaan kordinasi dengan KJRI melalui WA.



Gambar 4. Koordinasi Awal Tim PKM dengan KJRI
Sumber : Dokumentasi Tim, 2024

Selain melakukan koordinasi dengan KJRI secara daring melalui berbagai platform yang kemudian akan ditindaklanjuti pada tahap pelaksanaan, Tim PKM juga melakukan penjangingan informasi dari PMI asal Ponorogo di Hong Kong. Informasi PMI Asal Ponorogo awalnya kami mendapat data dari pihak KJRI. PMI asal Ponorogo ini merupakan salah satu PMI yang aktif dalam komunitas besar secara nasional. Selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan PMI Asal Ponorogo yang bernama Eviana Setiawati. Beliau merupakan PMI Asal Ponorogo yang telah lama bekerja di Hong Kong kurang lebih selama 15 tahun. Dari hasil koordinasi ini didapati bahwa secara kelembagaan memang belum ada komunitas kedaerahan yang khusus PMI asal Ponorogo saja. Selama ini di bawah koordinasi dari KJRI telah terbentuk komunitas yang secara nasional saja yang diikuti oleh PMI dari seluruh Indonesia, termasuk PMI Eviana ini menjadi anggota dari komunitas tersebut. Informasi lain yang didapat yaitu secara informal PMI asal Ponorogo beberapa telah terhubung dengan

sendirinya. Karena memiliki hari libur yang sama yaitu setiap Sabtu dan/atau Minggu, maka PMI ini sering bertemu dengan sengaja maupun tidak sengaja di beberapa tempat di Hong Kong, yang kemudian berlanjut komunikasinya. Kedua, PMI asal Ponorogo ini sudah kenal sebelum bekerja di Hong Kong sehingga berkomunikasi kembali. Namun hubungan tersebut hanya sebatas informal saja. Kondisi tersebut menjadi cikal bakal yang mendasari kegiatan PKM ini. Berikut dokumentasi koordinasi awal dengan PMI Asal Ponorogo.



Gambar 5. Koordinasi Awal dengan PMI Asal Ponorogo di Hong Kong
Sumber : Dokumentasi Tim, 2024

Kebanyakan PMI berasal dari daerah desa sehingga tingkat literasinya pun rendah terkait dengan komunikasi dengan pemerintah. Dalam hal ini komunitas kedaerahan dianggap penting adanya sebab sebagai seseorang akan merasa aman dan nyaman jika bertemu dengan oranglain yang berasal dari daerah yang sama. Kesamaan daerah asal menjadi pemicu terbentuknya sebuah kelompok sebab memiliki kebiasaan, adat istiadat, ataupun bahasa yang sama sehingga tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi antara satu dengan yang lain dan terjalin hubungan kekeluargaan. Yang terjadi saat ini adalah mereka masih belum ada wadah komunitas kedaerahan sehingga hanya menjalin komunikasi dengan grup-grup kecil dengan PMI yang berasal dari daerah yang lain. Masih banyak PMI yang merasa sendiri dan hal ini sangat mempengaruhi kondisi psikis mereka yang merasa tidak nyaman dan tidak aman di negeri orang yang jauh dari keluarga.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan melalui komunikasi secara daring dengan PMI Ponorogo, tim PKM mengidentifikasi terdapat beberapa masalah antara lain : a) Belum adanya kelembagaan formal kedaerahan PMI ponorogo yang di hongkong sehingga berjalan masing-masing bergabung dengan komunitas kecil baik komunitas satu agensi maupun komunitas kajian agama dan keterampilan; b) Minimnya pemanfaatan jejaring social kedaerahan secara lingkup kecil yang dilakukan untuk berkegiatan bersama dalam hal pengembangan diri maupun aktualisasi diri; c) Belum dimanfaatkan secara baik momentum bersama yang dilakukan setiap bulan sekali bahkan setiap minggu sekali yang dilakukan sebab tidak terorganisir sehingga kurang memberi manfaat satu sama lain; d) belum adanya wadah untuk konsultasi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh PMI ponorogo hongkong yang mampu menjembatani dengan KJRI sehingga kebanyakan memilih untuk memendam masalah sendiri dan berpengaruh pada kondisi psikis; e) belum adanya kegiatan yang terorganisir dan dapat memberikan kebermanfaatn bagi individu, kelompok kedaerahan maupun kelompok PMI yang berasal dari daerah lain. Identifikasi masalah tersebut menjadi acuan utama bagi tim PKM untuk kemudian menyusun rencana kegiatan PKM yang akan dilakukan sebagai salah satu upaya guna membantu memfasilitasi PMI ponorogo hongkong untuk membentuk komunitas kedaerahan secara formal dan melakukan advokasi berjenjang dengan pihak KJRI sebagai representative pemerintah RI yang ada di hongkong.

Tahap identifikasi masalah ini dilakukan dengan melaksanakan komunikasi secara daring dengan PMI Ponorogo hongkong dengan cara brainstorming atau pendalaman dengan para PMI ponorogo Hongkong untuk mendapatkan informasi awal yang valid terkait dengan berbagai masalah yang dihadapi. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis kebutuhan yang harus dipenuhi dan difasilitasi dalam pelaksanaan PKM internasional ini. Berikut dokumentasi komunikasi awal tim PKM dengan PMI ponorogo Hong Kong. Dari hasil identifikasi masalah tersebut maka tim PKM melanjutkan menyusun dan mengidentifikasi kebutuhan yang harus dijembatani dan difasilitasi oleh tim PKM diantaranya adalah : a) pembentukan organisasi formal kedaerahan; b) pemberian materi advokasi berjenjang; c) pembekalan materi maksimalisasi penggunaan media sosial dalam melakukan advokasi berjenjang.

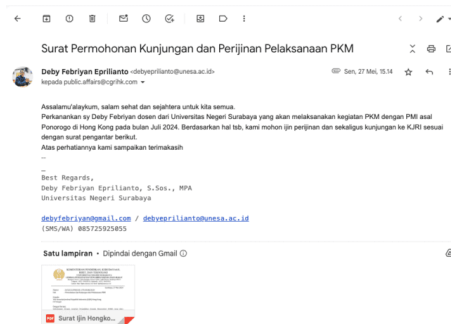
Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini adalah tahap pelaksanaan rangkaian PKM internasional. Tahap pelaksanaan dibagi menjadi 2 tahap yakni dilaksanakan secara daring dan luring. Pada tahap daring ini dilakukan untuk berkordinasi dengan KJRI dan PMI ponorogo hongkong. Tim PKM menghubungi dan bersurat kepada KJRI dalam rangka pemberitahuan dan perijinan atas kegiatan yang akan dilakukan sehingga terbit surat persetujuan kegiatan oleh KJRI (terlampir). Sedangkan tahap pelaksanaan daring dengan PMI yakni dalam rangka pendampingan secara daring dengan mengidentifikasi masalah dan identifikasi kegiatan sebagai dasar bahan materi pelatihan dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara luring. Pelaksanaan secara daring diawali dengan penjaringan PMI Asal Ponorogo yang bekerja di Hong Kong, berawal dari bantuan informasi dari Eviana kemudian membentuk WA Group mulai mencari dan mendata PMI yang lainnya. Sampai dengan saat ini jumlah anggota WA Group PMI Asal Ponorogo di Hong Kong sudah berjumlah 53 orang yang awalnya hanya 5 orang. Berikut dokumentasi WA Group PMI Asal Ponorogo di Hongkong.



Gambar 6. WA Group PMI Asal Ponorogo di Hong Kong
Sumber : Dokumentasi Tim, 2024

Terdapat perubahan nama sesuai dengan hasil kesepakatan dengan PMI Asal Ponorogo di Hongkong secara daring dari nama Keluarga Ponorogo HK menjadi Seduluran Ponorogo Hong Kong. Terdapat tambahan jumlah anggota di WA Group menjadi 53 orang. Hal ini merupakan hasil penjaringan dari PMI Asal Ponorogo yang bergabung diawal. Selain telah melakukan pembuatan WA Group PMI Asal Ponorogo di Hong Kong, tim PKM juga melakukan komunikasi tindak lanjut dengan KJRI. Melakukan koordinasi lanjutan melalui surat resmi dan daring melalui zoom. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan dari KJRI untuk bersurat secara resmi terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKM ini. Berikut dokumentasi surat resmi yang telah dikirimkan tim PKM kepada KJRI.



Gambar 7. Tindaklanjut Surat Resmi Tim PKM kepada KJRI
Sumber : Dokumentasi Tim, 2024

Selanjutnya dari surat resmi yang telah dikirimkan tim PKM, selanjutnya mendapat respon melalui surat resmi dari KJRI terkait persetujuan pelaksanaan PKM. Kegiatan PKM disetujui oleh KJRI sehingga kegiatan secara luring dapat dilaksanakan di Hong Kong. Namun tim PKM mendapat kendala terkait dengan tempat, karena pada tanggal 13-14 Juli 2024 ruangan di KJRI digunakan untuk kegiatan internal lainnya. Namun bantuan dari PMI Asal Ponorogo di Hong Kong kegiatan akan dilaksanakan secara luring di ruangan Gedung Dompot Dhuafa Hong Kong. Sudah ditindaklanjuti oleh

tim PKM dengan bersurat secara resmi dan diterima serta disetujui kegiatan dapat dilakukan diruangan tersebut. Kegiatan akan dibersamai oleh perwakilan dari KJRI. Berikut respon dari KJRI terkait persetujuan akan pelaksanaan kegiatan PKM dari Unesa yang akan dilakukan secara luring di gedung Dompot Dhuafa pada tanggal 13-14 Juli 2024.



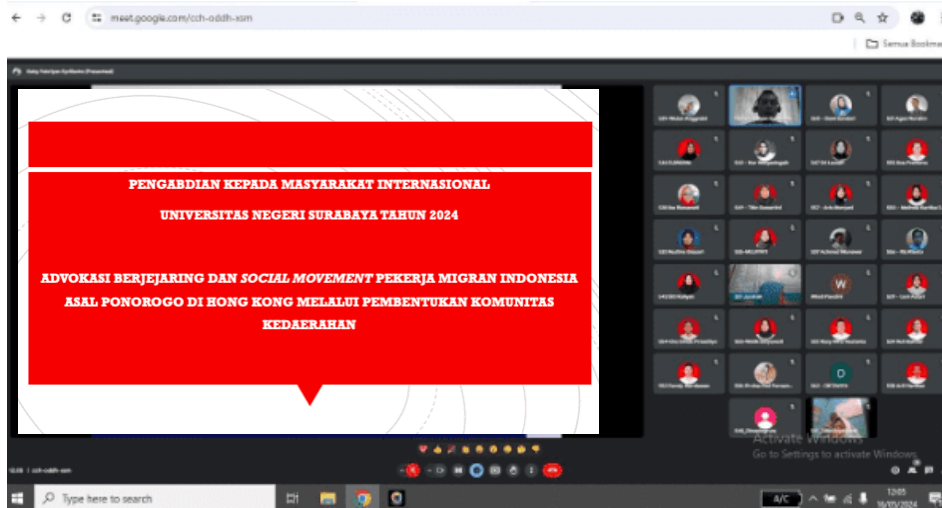
Gambar 8. Respon Persetujuan KJRI Pelaksanaan Kegiatan PKM
Sumber : Dokumnetasi Tim, 2024

Selain telah melakukan tindaklanjut melalui surat resmi, tim PKM juga telah melakukan kegiatan tindaklanjut melalui pertemuan daring. Kegiatan pertemuan daring telah dilakukan dengan KJRI dengan pembahasan pentingnya pembentukan komunitas kedaerahan PMI di Hong Kong. Pertemuan daring dilakukan melalui zoom yang dihadiri oleh tim PKM dan perwakilan KJRI. Pembahasan lebih lanjut dengan KJRI terkait persetujuan dalam pembentukan komunitas kedaerahan PMI Asal Ponorogo di Hong Kong. Berikut dokumentasi pelaksanaan pertemuan daring melalui zoom dengan KJRI.



Gambar 9. Pertemuan Daring Tim PKM dengan KJRI
Sumber : Dokumentasi Tim, 2024

Selain melakukan kegiatan pertemuan daring dengan KJRI, tim PKM juga telah melakukan pertemuan daring melalui zoom dengan PMI Asal Ponorogo. Kegiatan secara daring ini dilakukan untuk memberikan persamaan persepsi terkait kegiatan dalam PKM ini. PMI Asal Ponorogo di Hong Kong memberikan respon yang baik dan siap memberikan dukungan terhadap rangkaian kegiatan PKM ini. Pada kegiatan pertemuan daring ini tim PKM dapat memperoleh informasi dan data untuk menjadi dasar dalam penyusunan materi dan menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan luring nanti. Berikut dokumentasi pelaksanaan pertemuan daring dengan PMI Asal Ponorogo di Hong Kong.



Gambar 10. Pertemuan Daring dengan PMI Asal Ponorogo di Hong Kong
Sumber : Dokumnetasi Tim, 2024

Selain pelaksanaan secara daring, kegiatan dalam pelaksanaan PKM ini juga akan dilakukan secara luring di Hong Kong. Sesuai dengan persetujuan pelaksanaan dan tempat/lokasi pelaksanaan PKM, maka kegiatan PKM akan dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 15 Juli 2024. Kegiatan secara luring dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan dan bertempat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong pada tanggal 12-13 Juli 2024. Kegiatan FGD ini bertujuan untuk penjajagan kerjasama antara Unesa dengan KJRI Hong Kong dan kordinasi terkait dengan materi yang akan disampaikan pada kegiatan PKM ini. FGD ini dibersamai oleh Konsul Penerangan, Sosial, dan Budaya (Pensosbud) KJRI Hong Kong yang diketuai oleh Ibu Endah R. Yuliarti. Pada kesempatan ini dibahas terkait dengan peluang kerjasama dalam aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara Unesa dengan KJRI Hong Kong yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU atau dokumen perjanjian kerjasama. Berikut dokumentasi FGD dengan KJRI Hong Kong.



Gambar 11. FGD dengan KJRI Hong Kong
Sumber : Dokumentasi Tim PKM, 2024

Sedangkan kegiatan utama dalam pelaksanaan PKM ini yaitu pelatihan dan pendampingan pembentukan komunitas kedaerahan PM asal Ponorogo di Hong Kong. Kegiatan dilakukan secara luring bertempat diruang Dompot Dhuafa Hong Kong. Kegiatan pertama dilakukan melalui pelatihan advokasi berjenjang oleh narasumber dari tim PKM berasal dari Program Studi Ilmu Hukum Unesa. Materi yang disampaikan terkait dengan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan pada program advokasi melalui berbagai pihak/stakeholders yang terlibat mulai dari pihak publik maupun swasta. Pada pelaksanaan kegiatan advokasi ini juga dilakukan diskusi dengan peserta. Berikut dokumentasi penyampaian materi advokasi berjenjang dan pendampingan pembentukan komunitas kedaerahan PMI asal Ponorogo oleh nara sumber.



Gambar 12. Penyampaian Materi Advokasi Berjenjang dan Pendampingan Pembentukan Komunitas Kedaerahan PMI asal Ponorogo di Hong Kong
Sumber : Dokumentasi Tim PKM, 2024

Selain menyampaikan materi terkait dengan advokasi berjenjang bagi PMI di Hong Kong, kegiatan utama dalam pelaksanaan PKM ini juga tim melakukan pendampingan dalam pembentukan komunitas kedaerahan PMI Asal Ponorogo di Hong Kong. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, komunitas dinamai IWPH yang merupakan singkatan dari Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong. Nama komunitas ini merupakan kesepakatan peserta yang hadir, yang selanjutnya juga disepakati struktur organisasi, visi dan misi, serta AD ART komunitas IWPH ini. Setelah terbentuk, dalam kesempatan yang sama tim PKM juga melakukan pendampingan dalam pembuatan dan pengelolaan media social komunitas. Media sosial ini diharapkan dapat digunakan sebagai media untuk menyebarluaskan informasi terkait aktivitas komunitas ini. Tim PKM akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap komunitas yang telah terbentuk, termasuk melakukan koordinasi dan integrasi pada KJRI Hong Kong serta pihak yang terlibat lainnya, agar keberadaan komunitas ini dapat secara legal diakui.

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan PKM ini telah dilaksanakan baik secara daring dan luring melalui penyampaian materi, FGD dan pendampingan. Tim PKM telah melakukan kegiatan advokasi bernjenjang pada PMI di Hong Kong, serta mendampingi pembentukan komunitas kedaerahan PMI asal Ponorogo di Hong Kong dengan nama IWPH (Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong). Yang mana keberadaan IWPH ini telah disampaikan oleh tim PKM kepada KJRI Hong Kong supaya aktivitas yang dilakukan dapat terintegrasi dan saling melengkapi.

SARAN

Saran yang dapat tim PKM sampaikan : 1) untuk penguatan kelembagaan komunitas IWPH maka dihimbau untuk melakukan pelatihan dan pengembangan diri, 2) melakukan koordinasi dan integrasi pada KJRI Hong Kong dan pihak terkait lainnya, 3) menyusun program kerja baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang, dan 4) komunitas ini memerlukan pendampingan, pelatihan dan program lain dalam pelaksanaan PKM selanjutnya yang dapat ditindaklanjuti oleh tim PKM dari berbagai universitas lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unievrasita Negeri Surabaya yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini. Terimakasih juga tim PKM sampaikan kepada KJRI Hong Kong yang telah memberikan ijin terlaksananya kegiatan PKM ini, serta kepada Dompot Dhuafa Hong Kong yang telah memfasilitasi berupa perijinan tempat atas terlaksananya kegiatan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afrindo, Andreas. 2014. Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (Sbmi) Malang. Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, 1(2)

- Alunaza, H., Mentari, M., Anugrah, A. R. S., & Iriansyah, A. 2023. Peran Lintas Sektor Dalam Upaya Mitigasi Pekerja Migran Indonesia Di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(1).
- Auliya, G. 2022. Faktor-Faktor Pekerja Migran Indonesia Bekerja di Luar Negeri Studi Kasus Kabupaten Sambas. *Jurnal Djkn. Kemenkeu*, July, 1-26.
- BP2MI, B. P. (2020). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode tahun 2020*. Jakarta: BP2MI.
- BP2MI. (2023). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Januari-Mei 2023*, diakses melalui https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-06-2023_Laporan_Publikasi_Bulan_Mei_2023_merged.pdf, tanggal 4 Juli 2023 pukul 13.55 WITA.
- Denimah, D., dan Nurika, R. R. 2023. Kontribusi Program Maju Perempuan Indonesia Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Mampu) Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals Di Indonesia. *SIYAR Journal*, 3(1), 14-30.
- Fikriansyah, Z., & Julia, A. 2023. Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 25-32.
- Hamid, S. 2023. *Efektivitas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif (Studi Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Hidayat, I. D., Ihsan, W. W., dan Najicha, F. U. 2021. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 71-80.
- Jumaah, Siti Hidayatul. 2023. *Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) dan Perannya dalam Mengatasi Human Trafficking Pekerja Migran Indonesia di Lombok Timur*. *Thejournalish: Social and Government*, 4(3)
- Lubis, Nurhayati. 2012. *Advokasi Bagi Pekerja Migran Perempuan*. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 11(1), 1-12
- Madaniyah, A. S., Sophianandita, D. P., Irawan, P. T., dan Silalahi, Y. L. 2024. Peran International Labour Organization (ILO) dalam Perlindungan HAM Pekerja Migran Indonesia. *Synergisia*, 1(1).
- Martiany, D. 2016. Fenomena pekerja migran Indonesia: Feminisasi migrasi. *Kajian*, 18(4), 289-303.
- Ningtyas, B. K., dan Fauziyah, F. 2024. Forum Konsultasi Publik Dalam Mewujudkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya. *PROFICIO*, 5(2), 396-401.
- Oroh, J. 2023. Peran BP2MI Dalam Pencegahan Penempatan Pekerja Migran Ilegal Melalui Program Satuan Tugas Pemberantasan Pekerja Migran Ilegal Indonesia Di Era Covid-19. *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 81-94.
- Pratama, I. Z. 2020. Kerjasama ILO dan Indonesia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Lewat Program Decent Work Country Programmes (DCWP). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 3(02), 49-64.
- Qawiyurrijal, N. 2021. *Pekerja Migran Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Bingkai Media Daring (Analisis Framing Model Robert N. Entman Pada Portal Berita Bbc News Indonesia Periode Januari–Mei 2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Sarira, I. 2018. *Kewenangan Formil & Materiil Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Sebagai Lex Posterior Terhadap Peran Pemerintah Dan Lembaga Independen*. *Mimbar Hukum*, 35
- Septika, C. A., dan Kualifin, M. D. A. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Hongkong Atas Tindakan Overcharging. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 4(1), 1-25.
- Solechan, S., Utami, T. R., dan Azhar, M. 2020. Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 153-161.
- Utami, S. A. 2023. *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Hong Kong Selama Pandemi Covid-19*.
- Widodo, H., dan Belgradoputra, R. J. 2019. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107-116.
- Yuspin, W., Azhari, A. F., Wardiono, K., Zuhdi, S., Kurnianingsih, M., dan Marjanah, I. D. 2024. Peningkatan Kesadaran Hukum Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong: Increasing Legal Awareness of the Importance of Personal Data Protection For Indonesian Migrant Workers in Hong Kong. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(1), 95-104.